

**KERJASAMA LUAR NEGERI PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA DALAM RANGKA PENINGKATAN INVESTASI ASING
TAHUN 2012-2015**

*The Foreign Cooperation of Purbalingga Region Government in Increasing
Foreign Investation During 2012-2015*

Anita Restiana

Dosen Pembimbing : DR. Sidik Jatmika, M.si

Prodi Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACK

This research is to explain how the strategy the foreign cooperation of Purbalingga region government in increasing foreign investation during 2012-2015..

Purbalingga is one of the most favorite place for foreign investors to invest in this region. As for the strategy is to do with investment promotion, international cooperation, bussines gathering, and improving the quality of public service. Keyword : Foreign Cooperation, Foreign Investment

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Kabupaten Purbalingga adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Purbalingga dikenal sebagai kabupaten yang pro-investasi. Hal ini terlihat dari banyaknya industri kecil hingga besar yang tumbuh dan berkembang

di Purbalingga.¹ Bahkan, puluhan industri penanaman modal asing (PMA) yang sebagian besar berasal dari Korea Selatan juga banyak berdiri di Purbalingga guna mengembangkan industri pembuatan rambut dan bulu mata palsu. Keberadaan industri rambut dan bulu palsu di Purbalingga juga berdampak pada berkembangnya ratusan plasma-plasma dari perusahaan tersebut, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan bekerja sampingan sebagai pembuat rambut dan bulu mata palsu.

Tidak kurang dari 43.000 tenaga kerja perempuan terserap oleh perusahaan-perusahaan PMA tersebut. Ini belum termasuk tenaga kerja di plasma-plasma industri yang bertebaran di seantero wilayah Purbalingga. Sepanjang tahun 2012 realisasi penanam modal di Purbalingga mencapai Rp. 342,5 miliar. Terdiri dari sektor perdagangan sebesar Rp. 183 miliar, jasa konstruksi Rp. 60 miliar, reklame Rp.1,75 miliar, industri Rp. 92 miliar, pertambangan Rp. 4,25 miliar, dan sektor lainnya Rp. 1 miliar. Realisasi investasi tahun 2012 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp. 339.728.000,-²

Industri di Purbalingga didukung oleh banyak pihak yang berkontribusi untuk memajukan industri di Purbalingga. Industri yang berkembang pesat untuk saat ini salah satunya adalah industri yang berhubungan dengan rambut, rambut disini diolah menjadi berbagai macam produk seperti rambut palsu dan bulu mata palsu. Sektor ini sangat menguasai di Purbalingga dan berkontribusi dalam memajukan kesejahteraan khususnya dalam hal ekonomi dengan membuka

¹ <http://www.jatengprov.go.id/id/profil/kabupaten-purbalingga>

² <http://www.otda.kemendagri.go.id./index.php/berita-210/450-semakin-mantap-sebagai-daerah-investasi>

banyak lowongan pekerjaan sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran khususnya di daerah Purbalingga sendiri.

Kabupaten Purbalingga dikenal sebagai surganya para investor asing untuk menanamkan modal di wilayah ini. Selama beberapa tahun terakhir ini kurang lebih sudah ada terdapat 20 industri dalam negeri dan asing yang berdiri di kabupaten Purbalingga. Keberadaan PMA sangat membantu program pemerintah dalam menekan angka pengangguran di Purbalingga. Karenanya, pemerintah Kabupaten Purbalingga pun menerbitkan kebijakan-kebijakan pro investasi. Berbagai produk hukum berupa peraturan daerah (perda) dan peraturan bupati (perbup) memudahkan semua calon investor yang berminat menanamkan modalnya.

Kegiatan investasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menciptakan sarana dan prasarana dalam pembangunan sehingga pemerintah selalu berusaha menarik pengusaha asing guna menanamkan modalnya agar ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan investasi. Untuk mengatasi kekurangan modal pembangunan yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan karakteristik diatas menjadi lebih baik dari sebelumnya, sumber luar negeri berperan mengatasi kekurangan tabungan modal. Adapun bentuk-bentuk dari penanaman modal asing antara lain investasi asing secara langsung (*foreign direct investment*), investasi tidak langsung berbentuk portofolio, secara kredit import.

Dari bentuk-bentuk ini yang menonjol adalah investasi secara langsung (*foreign direct investment*) baik yang bersifat penuh maupun patungan (*joint direct investment*) dengan kekuatan ekonomi domestik. Investasi asing ini merupakan sumber-sumber baru yang dibutuhkan oleh negara berkembang dalam membangun masa depannya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten akan memiliki kewenangan yang cukup untuk melakukan identifikasi, perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah mereka. Dengan demikian pemerintah kota dan kabupaten harus siap menyiapkan program pembangunannya secara konseptual dan operasional. Kedudukan pemerintah kota dan kabupaten sebagai basis pembangunan negara berdaulat, hal demikian dapat dikatakan bahwa keberhasilan otonomi daerah akan banyak tergantung pada seberapa jauh partisipasi pemerintah kota dan pemerintah daerah dalam hal ini kegiatan pembangunan diwilayahnya masing-masing. Otonomi daerah diharapkan lebih menopang negara kesatuan agar dapat berperan dalam era globalisasi dan memberi kemudahan dalam dunia usaha dan penanaman modal.

2. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian diatas maka rumusan permasalahan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : Bagaimana strategi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam rangka meningkatkan investasi asing?

3. KERANGKA PEMIKIRAN

Untuk menjawab permasalahan diatas penulis memerlukan kerangka dasar pemikiran. Kerangka dasar pemikiran ini digunakan sebagai landasan teoritis yang relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

Hubungan Transnasional

Hubungan transnasional dapat diartikan sebagai hubungan antar masyarakat, organisasi, kelompok maupun komunitas dari negara yang berbeda. Dalam artian adalah hubungan yang terjadi dalam hubungan internasional bisa saja terjadi diantara orang yang tidak mempresentasikan negaranya.

Menurut Mohtar Mas'ood dalam bukunya aktor non negara dalam hubungan Internasional ini bisa berwujud kelompok-kelompok suku, etnis, atau separatis didalam negara, berbagai kelompok kepentingan ekonomi dan perusahaan-perusahaan multinasional bahkan bahkan bagian-bagian dari birokrasi pemerintah. Dalam pelaksanaan hubungan transnasional ini sering kali tanpa sepengetahuan pihak pimpinan negara yang terlibat, bagian-bagian dari birokrasi pemerintah suatu negara bertindak sendiri, berinteraksi langsung dengan bagian-bagian serupa dari birokrasi pemerintah negara lain. Hal itu terjadi karena pandangan kepada isu-isu sentral dalam interaksi internasional sudah berubah.

Pola hubungan transnasional ini melibatkan partisipasi yang lebih besar dari berbagai jenis aktor non negara, terutama dari organasasi internasional maupun perusahaan transnasional, dan tidak menutup kemungkinan akan muncul aktor baru. Kerjasama Kabupaten Purbalingga merupakan kerjasama yang dilakukan oleh aktor non negara yaitu aktor yang merupakan bagian-bagian dari

birokrasi Pemerintah pusat bisa berupa pemerintah kota atau negara bagian, masyarakat pun juga dapat berinteraksi dengan masyarakat negara lain. Organisasi pemerintah maupun non pemerintah dapat berhubungan secara langsung dengan masyarakat negara lain tanpa memerlukan pemerintah pusat.

Teori Penanaman Modal

Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli dalam kaitanya dengan berbagai faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing atau investasi asing disuatu negara. Dalam Teori Penanaman Modal yang dikemukakan oleh Alan M. Rugman menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) dipengaruhi oleh dua faktor yaitu : variable lingkungan dan variable internalisasi³. *Pertama*, variabel lingkungan, variabel lingkungan sering dikenal dengan istilah keunggulan spesifik Negara atau spesifik lokasi.

Ada tiga unsur yang membangun variabel lingkungan yaitu: ekonomi, non ekonomi, dan modal pemerintah. Variabel ekonomi membangun fungsi produksi suatu bangsa secara kolektif, yang secara definitif meliputi semua input faktor yang ada di masyarakat, antara lain tenaga kerja, modal (dana), teknologi dan tersedianya sumber daya alam dan ketrampilan manajemen yang disebut human capital⁴.

Adapun variabel non ekonomi yang memotifasi masuknya modal asing adalah keseluruhan kondisi politik, hukum dan sosial budaya yang melekat pada

³Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hubungan Internasional* (Yogyakarta:Bigraf Publishing, 2001) hal 78

⁴Sidikjatmika, *Otonomi daerah Dalam perspektif Hubungan internasional* (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2001) hal 79

suatu Negara. Adapun pengamat yang juga memasukan faktor pemerintahan yang bersih berwibawa pada suatu negara (*clean goverment and good governance*) baik tuan rumah (*host country*) ataupun pemerintah asal penanam modal itu. Selain sikap pemerintah yang lebih terbuka dengan segala kebijakan yang tidak memberatkan para investor asing yang ingin menanamkan modalnya juga menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam penanaman modal asing disuatu lokasi. *Kedua*, variabel Internalisasi atau keunggulan spesifik perusahaan. Ini merupakan yang kadang juga disebut sebagai faktor spesifik pemilikan⁵.

Jadi dengan adanya konsep penanaman modal Kabupaten Purbalingga diharapkan bisa mengetahui bagaimana cara berinvestasi yang menguntungkan kedua belah pihak, Kabupaten Purbalingga berupaya mencari ciri khas yang membedakan dengan daerah lain serta upaya meningkatkan daya saing iklim investasi, dan bagaimana cara meningkatkan investor asing yang mau menanamkan modalnya disuatu negara.

4. HIPOTESA

Dengan melihat latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dan didukung oleh teori-teori yang dinggap dapat membantu analisa maka penulis mengajukan hipotesa strategi yang diambil Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga terhadap investasi asing adalah sebagai berikut :

1. Promosi investasi dan kerjasama internasional
2. Bussines gathering dan peningkatan kualitas pelayanan publik

⁵ Alan M. Rugman, *Bisnis Internasional I* (Jakarta: PT. Intermedia, 1993), hal 147

5. PEMBAHASAN

Strategi meningkatkan kegiatan investasi ke depan di daerah Kabupaten Purbalingga bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah daerah namun sekaligus ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat. Konsep ini timbul didasarkan pada konsep negara kesatuan. Oleh karena itu, dengan adanya visi dan misi yang sejalan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan tetap mengedepankan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat keseluruhan hendaknya menjadi dasar pijakan pokok dalam merealisasi kebijakan dalam investasi.

Diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2001 telah memberikan peranan yang lebih besar kepada pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota untuk melayani konstituennya yang sesuai dengan prakarsa sendiri termasuk masalah investasi di daerah asalkan tidak melanggar undang-undang yang lebih tinggi.

Dari segi pemerintahan, kebijakan investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau tuan rumah tidak mempersulit investor dalam menjalankan usahanya. Proses birokrasi perijinan usaha yang tidak berbeli-belit serta rendahnya pajak bagi investor asing dan tidak adanya diskriminasi terhadap investor asing dengan pengusaha local. Pemerintah daerah seharusnya tidak membedakan pelayanan dan pemungutan pajak bagi perusahaan asing dan perusahaan local, maka upaya ini akan menarik minat para investor asing untuk menanamkan modalnya.

A. Promosi Investasi dan Kerjasama Internasional

1. Promosi Investasi

Promosi yang dilakukan secara terus menerus, baik dalam negeri maupun luar negeri serta peningkatan pelayanan perizinan merupakan faktor kunci untuk meningkatkan investasi. Faktor pendukung lainnya adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai sehingga mendukung kelancaran operasional sebuah kegiatan investasi.

Upaya tersebut terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam rangka menarik minat investor, baik investor dalam negeri atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun investor asing atau penanaman modal asing (PMA). Keberhasilan Kabupaten Purbalingga dalam menarik minat investasi asing tidak terlepas dari semangat badan yang mengurus investasi dalam memberikan pelayanan kepada para investor. Pelayanan yang dimaksud juga mencakup kemudahan perizinan investasi di Kabupaten Purbalingga.

Menyusul diberlakukannya kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan menerapkan pelayanan di satu tempat, semakin mendorong para investor menanamkan modalnya di Kabupaten Purbalingga, terutama penanam modal asing (PMA). Pelayanan Terpadu Satu Pintu diterapkan Purbalingga sejak 2003, mampu menggairahkan iklim investasi di bumi Perwira. Selama 12 tahun penerapan PTSP, hingga 2014 ini tercatat ada 20 PMA dan 537 PMDN. Perizinan yang mudah disertai pelayanan yang bagus diyakini akan terus menarik investor asing.

Promosi memiliki peranan kunci dalam strategi pemasaran. Dalam meningkatkan upaya promosi Kabupaten Purbalingga memiliki materi promosi sebagai berikut yang selalu dibawa dalam acara kegiatan promosi :

- a. Booklet Potensi, Peluang dan Profil Proyek Investasi Kabupaten Purbalingga
- b. Buku Peluang dan Potensi Investasi Kabupaten Purbalingga + Profil Investor
- c. Booklet Lanud Wirasaba Purbalingga Menuju Bandara Komersial
- d. VCD profil Investasi Kabupaten Purbalingga
- e. Booklet Pariwisata Kabupaten Purbalingga
- f. VCD Profil Pariwisata Kabupaten Purbalingga
- g. Booklet Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga
- h. Banner dan Poster Potensi Daerah Kabupaten Purbalingga

2. Kerjasama Internasional

Kabupaten Purbalingga mempunyai strategi dalam peningkatan negosiasi kerjasama Internasional/Asing dalam meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Purbalingga, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penanaman Modal di Kabupaten Purbalingga bab III bagian II Tentang Kerjasama Penanaman Modal Pasal 5 :

(1) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan pihak lain atas dasar

kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. perencanaan penanaman modal;
- b. promosi penanaman modal;
- c. pelayanan penanaman modal;
- d. pengembangan penanaman modal;
- e. pengendalian penanaman modal;
- f. kegiatan penanaman modal lainnya

Kerjasama diselenggarakan dalam rangka pengembangan penanaman modal di daerah didalam maupun diluar negeri, sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Adapun kerjasama dengan pihak asing yang saat ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah Kerjasama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan para pengusaha dari Jepang dan juga dengan Pemerintah Prefektur Kagawa . Pengusaha asal Jepang mulai menjajaki kerjasama dengan Purbalingga. Kerjasama ini bertujuan untuk membantu permasalahan yang ada di Purbalingga terutama jumlah penangguran yang dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Penjajakan kerjasama ini merupakan keprihatinan para pengusaha asal Jepang terhadap tenaga kerja Indonesia setelah pulang dari Jepang ternyata tidak berpengaruh secara signifikan di lingkungannya. Transfer ilmu dan teknologi inilah yang diperlukan oleh Purbalingga agar bisa maju seperti di Jepang.

Kunjungan ini merupakan awal bagi kerjasama lebih lanjut antara pemerintah daerah Purbalingga dengan pemerintah Prefektur Kagawa.

Penjajagan kerjasama ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi perkembangan perekonomian di Purbalingga, terutama didalam penyerapan tenaga kerja dari Purbalingga ke Jepang. Permasalahan ketenagakerjaan di Purbalingga pada saat ini adalah jumlah tenaga kerja perempuan lebih besar dari tenaga kerja pria. Pemerintah mengharapkan kerjasama yang akan dibangun ini akan mengurangi pengangguran terutama untuk tenaga kerja pria.⁶

B. Bussines Gathering dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Business Gathering

Adalah ajang promosi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan investor yang sudah atau akan menanamkan modalnya di Kabupaten Purbalingga untuk menjaga hubungan baik dengan para investor asing. Hal ini dilakukan agar pemerintah tahu permasalahan apa yang dihadapi oleh para investor dan juga untuk menjaga relasi baik dengan para investor agar mereka nyaman melakukan investasi di kabupaten purbalingga. Untuk meningkatkan pendapatan, dan menyelaraskan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat bidang investasi, dengan berbagai ketentuan, juga aspek lingkungan, diselenggarakan temu usaha (Business Gathering) antara para pimpinan berbagai

⁶ <http://kpmppt.purbalinggakab.go.id/?p=423>

perusahaan/investor baik PMDN, maupun PMA yang menanamkan modal di wilayah Purbalingga.

Acara ini rutin dilakukan setiap tahunnya oleh Kantor Penanaman Modal Kabupaten Purbalingga. Tujuannya adalah agar memahami arti penting, sinergitas, dalam upaya peningkatan investasi dengan tata ruang wilayah, serta mendorong peningkatan keberlangsungan investasi melalui lingkungan alam dan sosial yang bersinergi, dan untuk mendorong tenaga kerja, sebagai upaya meningkatkan produktifitas perusahaan, agar mendapatkan masukan/saran untuk peningkatan kinerja pemerintah.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang luas. Dalam kehidupan bernegara, maka setiap pemerintah daerah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat/ investor.

Perbaikan pelayanan publik tidak hanya ditujukan untuk memberi iklim kondusif bagi dunia usaha internasional namun juga meningkatkan daya tarik investasi ke Kabupaten Purbalingga, karena kredibilitas dan kemudahan yang meningkat. Pemerintah daerah mengupayakan untuk memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, dalam arti lebih berorientasi kepada aspirasi masyarakat / investor, yang lebih efisien, efektif dan bertanggung jawab terhadap investor.

Dengan kata lain pelaksanaan otonomi daerah adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pemerintah kabupaten menjadi lebih

responsive terhadap kebutuhan dan dinamika lokal. Oleh karena itu, muncul pola harapan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik akan lebih berkualitas bila pelaksanaan otonomi daerah juga dapat menjadi semakin baik⁷

Pentingnya faktor penunjang kualitas pelayanan publik serta pentingnya dilakukan perbaikan dan melengkapi sarana dan prasarana umum sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau investor salah satu contohnya :

1. Sarana

Sarana transportasi darat yang memadai yang menghubungkan Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten-Kabupaten lain seperti Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Pemasang, Kabupaten Pekalongan bisa memperlancar perhubungan darat. Selain itu Pemerintah Kabupaten Purbalingga bersama sejumlah Kabupaten lainnya, yakni Banyumas, Kebumen, Banjarnegara, Wonosobo sedang berupaya agar pangkalan udara (Lanud) Wirasaba dapat dikembangkan menjadi sebuah bandara komersil. Bila proyek sarana ini bisa terlaksana tentunya akan semakin memudahkan Kabupaten Purbalingga dalam meningkatkan investasinya, sebab sarana-sarana pendukung tersebut dapat mempermudah dalam proses pendistribusian.

2. Prasarana

Prasarana jalan transportasi darat di Kabupaten Purbalingga berupa jalan provinsi sepanjang 45.380km dan jalan kabupaten/kota sepanjang 687.360km.⁸

⁷ Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hubungan Internasional* (Yogyakarta:Bigraf Publishing2001) hal 78-79

⁸ <http://jateng.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/792>

Dari data yang ada, saat ini kondisi jalan di Purbalingga yang tergolong baik sepanjang 431.558 km atau 60.76 % dari total panjang jalan yang dimiliki Purbalingga. Sedangkan kondisi sedang sepanjang 133.652 km (18.82 %) , kondisi Rusak Ringan 50.84 km (7.16 %) dan jalan dengan kondisi Rusak Berat sepanjang 94.154 km atau 13.26 %. Target pada tahun anggaran 2014 adalah 73.44% jalan di Purbalingga dalam kondisi baik atau sepanjang 521.558 km.⁹

Ketersediaan listrik menjadi sesuatu yang krusial saat ini karena keterbatasan pasokan yang ada. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Purbalingga namun juga melanda hampir seluruh wilayah Indonesia. Di Purbalingga, listrik yang ada saat ini dipasok oleh PT. PLN untuk memenuhi kebutuhan 122.844 pelanggan dengan daya tersambung 94.633.496 dan KWH terjual sebesar 12.793.678.¹⁰

Selain itu diperlukan juga strategi dimana dapat menggairahkan peningkatan investasi asing di Kabupaten Purbalingga melalui berbagai upaya diantaranya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas aparatur pelayanan, sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada investor dengan cara mengubah pemahaman aparatur dari dilayani menjadi melayani.
- b. Menerapkan sistem pelayanan Perizinan Terpadu sehingga tercipta pelayanan yang mudah, efektif, transparan, dan akuntabel.

⁹ <http://dpu.purbalinggakab.go.id/?p=309>

¹⁰ <http://www.purbalinggakab.go.id/index.php/selayang-pandang/18-purbalingga/infrastruktur/223-infrastruktur.html>

- c. Memperkuat data peluang investasi yang profektif untuk dikembangkan.
- d. Promosi peluang investasi yang terencana dengan memperkuat basis data di website BPMD dan PPT serta menggalakan temu usaha dengan calon investor.
- e. Merancang dan menerbitkan peraturan daerah yang mampu memberikan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan langkah-langkah dan strategi diatas yang telah dilakukan maupun masih direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga ini, maka dapat mendorong untuk meningkatkan kegiatan investasi asing agar para investor asing mau menanamkan modalnya dan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat juga pemerintah daerah secara keseluruhan dan menambah pertumbuhan ekonomi. Peningkatan Investasi menjadi sangat penting, karena investasi akan terkait pula dengan pengembangan pengetahuan, politik dan teknologi, perluasan pasar dan jaringan kerjasama internasional yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan kegiatan perekonomian.

6. KESIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan strategi peningkatan sarana promosi investasi dalam maupun luar negeri, dengan meyebarkan data-data potensi investasi, membuat buku-buku potensi dan peluang investasi sekaligus memuat peta lokasi beserta penjelasan yang akurat mengenai data-data investasi. Melakukan pengembangan jaringan internet. KPMPT juga mempunyai agenda

promosi di forum-forum investasi yang diselenggarakan oleh BKPM pusat antara lain melakukan pameran, seminar potensi dan peluang investasi. Selain itu pemerintah Kabupaten Purbalingga juga melakukan kerjasama dengan pihak asing dalam rangka peningkatan penanaman modal di wilayah Purbalingga.

Pengadaan bussines gathering atau temu bisnis untuk mempererat tali silaturahmi dengan para investor asing membuat para penanam modal asing merasa nyaman dan betah melakukan kerjasama dalam bidang penanaman modal dengan pemerintah Kabupaten Purbalingga. Sikap pemerintah yang lebih terbuka dengan segala kebijakan yang tidak memberatkan para investor asing yang ingin menanamkan modalnya juga menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam penanaman modal asing.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar bisa meningkatkan daya saing iklim investasi antara lain tersedianya banyak tenaga kerja yang siap kerja yang siap paka. Secara teori penanaman modal asing (PMA) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan atau pembangunan ekonomi khususnya pemerintah daerah setempat lewat pembangunan pabrik-pabrik baru maka akan terciptanya lapangan pekerjaan baru.

Peran penanaman modal asing (PMA) di Kabupaten Purbalingga selain menambah mitra usaha asing seperti menjalin kerjasama investasi dengan beberapa investor dari luar negeri. Salah satunya peninjauan kerjasama dengan Jepang. Kerjasama ini bertujuan untuk membantu permasalahan yang ada di

Purbalingga terutama jumlah penangguran yang dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Kabupaten Purbalingga memfokuskan diri pada pemberdayaan manusia melalui peningkatan mutu dan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang lebih ahli dalam bidang tertentu, moral yang baik, terampil cekatan dan professional sehingga masyarakat/investor mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan publik yang telah dibangun bersama agar bisa dirawat dan dimanfaatkan sebaik mungkin, juga lebih penting mengutamakan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan investor. Mengupayakan pelayanan penyederhanaan prosedur investasi dan memperpendek arus birokrasi yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan pada langkah dan strategi yang telah dilakukan maupun direncanakan oleh Kabupaten Purbalingga, maka dapat mendorong untuk meningkatkan kegiatan investasi asing agar para investor mau menanamkan modalnya dan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan serta menambah pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi menjadi sangat penting, karena investasi tidak hanya berarti penambahan modal saja akan tetapi investasi akan terkait pula dengan pengembangan pengetahuan, politik dan teknologi, perluasan pasar dan jaringan kerjasama internasional yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan kegiatan perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Jatmika, Sidik. 2001. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hubungan Internasional*
Yogyakarta: Bigraf Publishing.

Rugman, Alan M. 1993. *Bisnis Internasional*. Jakarta : Intermasa.

Internet

<http://dpu.purbalinggakab.go.id/?p=309>

<http://jateng.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/792>

<http://jatengprov.go.id/id/profil/kabupaten-purbalingga>

<http://kpmpt.purbalinggakab.go.id/?p=423>

<http://www.otda.kemendagri.go.id./index.php/berita-210/450-semakin-mantap-sebagai-daerah-investasi>

<http://www.purbalinggakab.go.id/index.php/selayang-pandang/18-purbalingga/infrastruktur/223-infrastruktur.html>